



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA**

**DISAIN SISTEM DAN PROSEDUR PENGENAAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI  
*E-COMMERCE***

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar  
Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi

Oleh:

**Nama : Budiman Abas  
NPM : 0606017864**

**Jakarta  
2008**

**UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICS SCIENCE  
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE  
POSTGRADUATE PROGRAM  
ADMINISTRATIVE STUDY PROGRAM  
MAJORING ADMINISTRATIVE AND TAX POLICY**

N a m e : Budiman Abas

N P M : 0606017864

**THE DESIGN OF SYSTEM AND PROCEDURE IN TAXING VAT ON  
E-COMMERCE TRANSACTION**

xvi+ 109 pages + 8 enclosures

Bibliography : 31 Books + 16 journals and articles + 9 regulations ( 1981 – 2007 )

**ABSTRACT**

The term e-commerce is defined as a business mechanism using electronic media. It is shown that e-commerce develops significantly year by year along with the development of information technology. Although, the possibility to impose consumption tax namely Value Added Tax (VAT) on such transaction is very high. However, until now, the Indonesian VAT Law ( Law Number 18 Year 2000) has not clearly ruled the system and procedure of it. In some countries, as a comparison, such as Ireland, United Kingdom (UK), Australia and Singapore, VAT already applied to this transaction.

This thesis is drawn up pursuant to reseach by using qualitative approach with analyzes descriptive methode. The aim of this research is to describe the economic substance of e-commerce transaction for impose VAT purpose. Data collection for the purpose of analyzes was obtained through document evaluation comprising bibliography study and site research that shall cover interview with officials of Direktorat General of Taxes and Sub Directorate of Politic, Law and

Security Application on Departement of Information and telematics. Theoretical reference applied is tax collection and tax system theory, VAT theory, taxing principles, and supplies concept.

As a comparison, bibliography study and site research is done to certain country to describe how their VAT regulation treating e-commerce taxation. How they identify the object, person, tax due and it's administration procedure.

According to this research, Indonesia is still enable to impose VAT on e-commerce transaction pursuant to taxation law, that is VAT Law and The General Tax Provisions and Procedures Law, and strenghtened with The Law of Information and Electronic Transaction (Law Number 11 Year 2008) that arrange of using electronic document, digital signature, and the arrangement of the persons who involve in electronic transaction (e-commerce).

Therefore, it is advisable to Directorate General of Taxes in order to make a clear and comprehensive regulation about e-commerce transaction, especially in making system and procedure for taxing VAT on e-commerce transaction base on certainty principle, ease of administration and low cost by using technology.

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

N a m a : Budiman Abas

N P M : 0606017864

**DISAIN SISTEM DAN PROSEDUR PENGENAAN PPN ATAS TRANSAKSI  
E-COMMERCE**

xvi + 109 halaman + 8 lampiran

Daftar Pustaka : 31 Buku + 16 Jurnal dan Artikel + 9 Peraturan ( 1981 – 2007 )

**ABSTRAK**

*E-commerce* diartikan sebagai mekanisme bisnis dengan menggunakan media elektronik. Perkembangannya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Peluang untuk mengenakan pajak atas transaksi ini sangat besar terutama Pajak Konsumsi yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun sampai dengan saat ini, ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu UU PPN Tahun 2000, belum mengatur secara jelas tentang bagaimana sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi ini. Pada beberapa negara seperti Irlandia, Inggris, Australia dan Singapura secara khusus telah membuat aturan mengenai transaksi ini.

Tesis ini disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melukiskan substansi ekonomi transaksi *e-commerce*. Pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen meliputi studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu staf Sub Direktorat PPN Jasa dan Kepala Sub Direktorat Aplikasi

Politik Hukum dan Keamanan Direktorat *E-Business* pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Kerangka teori yang digunakan adalah teori sistem dan pemungutan pajak, teori PPN, prinsip pemajakan, dan konsep penyerahan.

Sebagai perbandingan, dilakukan studi pustaka terhadap beberapa negara untuk mengetahui bagaimana negara-negara tersebut memperlakukan transaksi *e-commerce* dalam ketentuan PPN-nya. Bagaimana negara tersebut melakukan identifikasi atas obyek, subyek dan saat terutangnya dan bagaimana prosedur administrasinya.

Berdasarkan penelitian, Indonesia masih dimungkinkan melakukan pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* berdasarkan ketentuan Undang-undang perpajakan terutama UU PPN Tahun 2000 dan UU KUP Tahun 2007. Ketentuan pengenaan PPN diperkuat juga dengan dikeluarkannya aturan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 11 Tahun 2008) yang intinya mengatur masalah penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik dan pengaturan pelaku transaksi *e-commerce*.

Untuk itu diharapkan Direktorat Jenderal Pajak agar membuat aturan yang jelas mengenai transaksi *e-commerce* terutama dalam membuat sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* yang didasarkan atas asas kepastian hukum, asas kemudahan dan berbiaya rendah dengan menggunakan bantuan teknologi.

UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : BUDIMAN ABAS  
N P M : 0606017864  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan  
Judul : Disain Sistem dan Prosedur Pengenaan  
Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi  
*E-Commerce*

Dosen Pembimbing

DR. Haula Rosdiana, M.Si.

UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : BUDIMAN ABAS  
N P M : 0606017864  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan  
Judul : Disain Sistem dan Prosedur Pengenaan  
Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi  
*E-Commerce*

Telah dipertahankan dihadapan sidang Penguji Tesis Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Juni 2008  
J a m : 13.00 WIB

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Prof. DR. Bhenyamin Hoessein ( )

Sekretaris Sidang : Drs. Achmad Lutfi, M.Si. ( )

Pembimbing : DR. Haula Rosidana, M.Si. ( )

Penguji Ahli : Dra. Titi Muswati Putranti, M.Si. ( )

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia dan cahaya petunjukNya yang tiada tara, sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap tertuju pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dengan perjuangan yang tinggi dan keikhlasan yang mendalam dalam memberantas kebodohan dan menegakan kebenaran di muka bumi ini.

Tesis yang berjudul "*Disain Sistem dan Prosedur Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce*" ini merupakan hasil penelitian yang ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar akademik Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Penulis sangat sadar bahwa apa yang telah kami raih bukanlah suatu hal yang mutlak yang berdiri sendiri. Selain atas *ma'unah* Allah sebagai *Robbul Jalil*, kepedulian, bimbingan dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak yang turut menentukan apa yang kami raih ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini tidak terlalu berlebihan bila kami menyampaikan terima kasih terutama kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. Bhenyamin Hoessein, selaku Ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
2. DR. Haula Rosdiana, M.Si. selaku pembimbing penyusunan tesis, ditengah aktifitas yang padat, beliau berkenan membimbing, mengarahkan penulis dengan kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa.
3. Drs. Achmad Lutfi, M.Si., selaku Sekretaris Sidang yang telah memberikan masukan atas penulisan tesis ini.
4. Dra. Titi Muswanti Putranti, M.Si., selaku Pembaca Ahli yang telah menguji dan memberi masukan atas penulisan tesis ini.
5. Sekretaris program, staf dan petugas perpustakaan Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Kebijakan dan Administrasi perpajakan.
6. Drs. Harri Hermawan Soelias, Ak., MBA selaku Kepala KPP Pratama Jakarta Menteng Dua, Ir. Tetty Lismey Verandina selaku Kasi Pengawasan dan Konsultasi I beserta para *Account Representaive*-nya, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya.



7. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Angkatan XII yang telah memberikan dorongan dan sebagai partner yang baik dalam berdiskusi.
8. Ayah dan mamah Ambun yang tercinta, dengan segala doa dan jerih payahnya telah mendidik, membimbing, membesarkan penulis dengan kasih sayang demi mencari dan menuju masa depan yang terang dibawah *ridho* Allah. Tak lupa untuk Bapak Ibu mertua di Magelang, terima kasih tak terhingga atas doa yang tulus yang ditujukan untuk penulis selama menjalani pendidikan ini.
9. Istriku tercinta, Purwanti, yang menjadi pendamping dalam suka maupun duka, yang tak lelah memberikan doa dan dorongan semangat yang tiada hentinya.
10. Terakhir kakak (Mpo' Ipah dan Abang Usup, Mba Tien dan Mas Wan, Mba Lia dan Mas Wied), adik-adik (Pak Guru Didi dan Nenik, Fit dan Sus, Nela dan Ari, dan Mas Geri) dan keponakan-keponakan (Faizal, Ardha, Shella, Nindi, Zevanya, Malvin, Cia, dan Andien).

Serta kepada seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu dalam tulisan ini, semoga amal baikya dibalas oleh Allah SWT, dengan cara dimudahkan segala urusannya dan dilimpahkan rizqi-Nya, amin.

Akhirnya dengan kesadaran yang tinggi sebagai penulis yang *dhoif*, apa yang penulis tuangkan dalam tesis ini jauh dari idealitas dan kesempurnaan, namun dengan lapang dada dan semangat memperbaiki, penulis menerima segala kritik yang konstruktif demi perbaikan tesis ini. Semoga apa yang penulis tuangkan menjadi bagian dari kemanfaatan yang penulis harapkan khususnya dalam bidang Kebijakan dan Administrasi Perpajakan.

Jakarta, Juni 2007

Penulis,

Budiman Abas

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Judul .....	i
Abstrak .....	ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas .....	vi
Lembar Persetujuan Tesis .....	vii
Lembar Pengesahan Tesis .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Gambar .....	xvi
<b>BAB I      Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Internet dan <i>E-Commerce</i> .....	1
1.1.2 Potensi Perdagangan Secara <i>E-Commerce</i> .....	4
1.1.3 <i>E-Commerce</i> dan Pajak atas Konsumsi .....	6
1.2 Perumusan Pokok Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Signifikansi Penelitian .....	10
1.4.1 Signifikansi Akademis .....	10
1.4.2 Signifikansi Praktis .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II     Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian</b> .....	<b>12</b>
2.1 Sistem dan Administrasi Perpajakan .....	12
2.2 Konsep dan Teori Pajak Konsumsi .....	16
2.3 <i>Value Added Tax</i> (Pajak Pertambahan Nilai) .....	19
2.3.1 Metode Penghitungan PPN .....	22
2.3.2 Tarif PPN .....	23
2.3.3 Faktur Pajak ( <i>Invoice</i> ) .....	24
2.3.4 Prinsip Pemajakan dalam PPN .....	24

2.4	<i>Taxable Event, Taxable Supply, dan Taxable Person</i>	
	Dalam PPN atas Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	26
2.4.1	Konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam PPN..	28
2.4.2	Penyerahan Barang ( <i>E-Commerce Supply of Goods</i> ) .....	28
2.4.3	Penyerahan Jasa ( <i>E-Commerce Supply of Service</i> ) .....	28
2.4.4	Peranan ISP .....	29
2.5	Rekomendasi OECD .....	31
2.5.1	Output atas Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	33
2.5.2	Definisi <i>Place of Consumption</i> .....	34
2.5.3	Mekanisme Pemungutan Pajak .....	35
2.5.4	Administrasi Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan .....	38
2.6	Disain Sistem dan Prosedur Pengenaan PPN atas Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	39
2.6.1	Mendisain Kebijakan PPN .....	44
2.6.1.1	Menentukan Obyek PPN .....	44
2.6.1.2	Mendisain Perlakuan Pengenaan PPN atas Konsumsi Barang .....	45
2.6.1.3	Merumuskan Pengertian Barang Kena Pajak dan Pengualiannya .....	45
2.6.1.4	Merumuskan Pengertian Penyerahan Barang yang Dikenakan PPN ( <i>Taxable-Supply</i> ) .....	46
2.6.1.5	Merumuskan <i>Taxable Person</i> .....	47
2.6.1	Mendisain <i>Electronic Policy</i> atas Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	48
2.7	Metode Penelitian .....	51
2.7.1	Jenis Penelitian .....	51
2.7.2	Pendekatan Penelitian .....	51
2.7.3	Metode Pengumpulan Data.....	51
2.7.4	Teknik Analisis Data .....	52

<b>BAB III</b>	<b>Gambaran Transaksi E-Commerce dan PPN di Indonesia</b>	<b>54</b>
3.1	Pengertian <i>E-Commerce</i> .....	54
3.2	Aspek Hukum Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	58
3.2.1	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	58
3.2.2	Gambaran Umum Pengenaan PPN di Indonesia .	59
3.2.2.1	Obyek Pajak .....	59
3.2.2.2	Subyek Pajak .....	61
3.2.2.3	Prosedur Pajak .....	62
3.3	UU PPN Tahun 2000 dan Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	62
<b>BAB IV</b>	<b>Analisis Disain Sistem dan Prosedur Pengenaan PPN atas Transaksi E-Commerce</b>	<b>64</b>
4.1	Identifikasi <i>Taxable Event</i> , <i>Taxable Supply</i> dan <i>Taxable Person</i> Transaksi <i>E-Commerce</i> Pengenaan PPN .....	64
4.1.1	<i>Taxable Event</i> Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	64
4.1.2	<i>Taxable Supply</i> Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	66
4.1.3	<i>Taxable Person</i> Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	67
4.2	Praktik Pengenaan PPN atas Transaksi <i>E-Commerce</i> Dibeberapa Negara .....	71
4.2.1	Praktik di Irlandia .....	72
4.2.2	Praktik di Inggris .....	75
4.2.3	Praktik di Australia .....	83
4.2.4	Praktik di Singapura .....	87
4.3	Disain Sistem dan Prosedur Pengenaan PPN atas Transaksi <i>E-Commerce</i> di Indonesia	91
4.3.1	Identifikasi Subyek dan Tempat Terutang .....	91
4.3.2	Mekanisme Pemungutan PPN .....	94
4.3.3	Administrasi Perpajakan .....	97

<b>BAB V</b>	<b>Kesimpulan dan Saran</b>	107
	5.1 Kesimpulan .....	107
	5.2 Saran .....	108

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

**Daftar Riwayat Hidup**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Pengguna Internet Dunia ..... 1
Tabel 1.2	Jumlah Pengguna Internet Asia Tenggara ..... 2
Tabel 1.3	Penambahan <i>IP Address</i> Di Indonesia ..... 3
Tabel 4.1	<i>Rules Relating to Physical Supply of Good – B2B</i> ..... 73
Tabel 4.2	<i>Rules Relating to Physical Supply of Good – B2C</i> ..... 74
Tabel 4.3	<i>Rules Relating to The Supply of Digitized Goods and Services – B2B</i> ..... 74
Tabel 4.4	<i>Rules For Online Supply and Digitized Product – B2C</i> ..... 75
Tabel 4.5	<i>GST Treatment fo Sales of Services/Digitized Goods</i> ..... 90
Tabel 4.6	Penyerahan Barang – B2B ..... 91
Tabel 4.7	Penyerahan Barang – B2C ..... 91
Tabel 4.8	Penyerahan Barang Digital dan Jasa – B2B ..... 92
Tabel 4.9	Penyerahan Barang Digital dan Jasa – B2C ..... 92

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Kompleksitas Pemajakan Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	7
Gambar 1.2	<i>Internet Base Commerce</i> .....	8
Gambar 2.1	Bagan Pajak Penjualan Sebagai Pajak Tidak Langsung	18
Gambar 2.2	Bentuk <i>E-Commerce Business</i> .....	30
Gambar 2.3	Sistem <i>Self Assesment</i> .....	38
Gambar 2.4	Proses Pengembangan Sistem .....	40
Gambar 2.5	<i>Logical Algorithm of Cybertaxation</i> .....	42
Gambar 2.6	<i>e-Tax Technology</i> .....	48
Gambar 2.7	Proses Analisis Data .....	52
Gambar 3.1	Mekanisme Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	56
Gambar 4.1	<i>Guideliness UK VAT on Electronically Supplied Where The Supplier Is In UK</i> .....	77
Gambar 4.2	<i>Guideliness UK VAT on Electronically Supplied Where The Supplier Is Within The EU</i> .....	78
Gambar 4.3	<i>Guideliness UK VAT on Electronically Supplied Service Where The Supplier Is Outside The EU</i> .....	79
Gambar 4.4	<i>Guideliness UK VAT on Broadcasting Service Where The Supplier is a UK Business</i> .....	80
Gambar 4.5	<i>Guideliness UK VAT on Broadcasting Service Where The Supplier is Within The EU</i> .....	81
Gambar 4.6	<i>Guideliness UK VAT on Broadcasting Service Where The Supplier is Outside The EU</i> .....	82
Gambar 4.7	Alur Penentuan Subyek Pengenaan PPN .....	93
Gambar 4.8	Alur Penentuan Subyek PPN .....	94
Gambar 4.9	Mekanisme <i>Self Assesment</i> PPN berbasis Teknologi ....	96
Gambar 4.10	Alur Administrasi <i>E-Commerce</i> Dalam Negeri .....	100
Gambar 4.11	Mekanisme <i>E-Filling</i> .....	104
Gambar 4.12	Mekanisme <i>E-Filling</i> dalam Rangka Pelaporan SPT PPN secara <i>online</i> .....	105